



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## BAB II

### TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

#### A. Teori Agensi

Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agent*. Teori agensi menurut Jensen dan Meckling (1976) yaitu:

*A contract under which one or more persons (the principal/s) engage an other person (the agent) to perform some service on their behalf which involve delegating some decisions making authority to the agent. If both partners to their relationship are utility maximizers there is good reason to believe that the agent will not always act in the best interests of the principal.*

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa teori agensi merupakan hubungan kontrak antara *principal* dan *agent*, dimana pihak *principal* memberikan suatu amanah kepada *agent* untuk melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Jika *principal* dan *agent* memiliki keinginan untuk memaksimalkan *utility* mereka masing-masing, maka akan menyebabkan besarnya kemungkinan *agent* tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik *principal*. Masalah agensi muncul ketika terjadi konflik kepentingan antara *principal* (pemegang saham) dan *agent* (manajer). Manajer mempunyai kewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham, namun disisi lain manajer juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka (Faizal, 2004).

Terjadinya *asymmetric information* antara manajer dan pemegang saham dapat memicu terjadinya masalah agensi (*agency problem*). Utama (2002) mengungkapkan bahwa masalah keagenan (*agency problems*) terjadi karena adanya *asymmetric information* antara pemilik dan manajer, yaitu ketika salah satu pihak memiliki informasi yang tidak dimiliki oleh pihak lainnya. Informasi yang diperoleh manajer sebagai pengelola perusahaan harus diungkapkan dalam laporan keuangan, namun karena adanya motivasi dari pihak manajer untuk meningkatkan kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan pemilik perusahaan, maka informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya (Kusuma, 2006).

Informasi yang tidak seimbang (*asymmetric information*) antara *agent* dan *principal* menimbulkan permasalahan yang disebabkan oleh adanya kesulitan *principal* untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan yang dilakukan *agent*. Scott (2000) dalam Utama (2002) menyatakan bahwa *asymmetric information* terdiri dari dua tipe, yaitu:

#### 1. *Adverse Selection*

Pada tipe ini, pihak yang merasa memiliki informasi lebih sedikit dibandingkan dengan pihak lain, tidak akan mau untuk melakukan perjanjian dengan pihak lain tersebut apapun bentuknya. Jika tetap melakukan perjanjian, maka akan ada pembatasan yang sangat ketat dan biaya yang sangat tinggi. Contohnya adalah kemungkinan konflik yang terjadi antara manajer dengan *investor*. Berbagai cara dapat dilakukan oleh manajer untuk memiliki informasi lebih dibandingkan

*investor*, misalnya dengan menyembunyikan, menyamarkan, memanipulasi informasi yang diberikan kepada *investor*. Akibatnya *investor* tidak yakin terhadap kualitas perusahaan dan tidak mau membeli saham perusahaan, atau membeli saham perusahaan dengan harga sangat rendah. Kondisi ini membuat pasar modal tidak berfungsi secara wajar.

## 2. *Moral Hazard*

*Moral hazard* terjadi kapanpun manajer melakukan tindakan tanpa sepengetahuan pemilik/pemegang saham untuk kepentingan pribadinya dan menurunkan kesejahteraan pemilik/pemegang saham. Contoh kasus dari masalah ini adalah kinerja manajer. Pada perusahaan korporasi yang relatif besar, dengan terpisahnya kepemilikan dan pengendalian manajemen, maka sulit bagi pemegang saham untuk melihat sejauh mana kinerja manajer sejalan dengan tujuan yang diinginkan pemegang saham. *Moral hazard* dapat menghambat operasi perusahaan secara efisien dan pada akhirnya akan menghambat efisiensi ekonomi secara keseluruhan.

Fenomena masalah agensi (*agency problems*) dalam perusahaan menjadi dasar diterapkannya *corporate governance* sebagai mekanisme yang mengontrol terjadinya benturan kepentingan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan.

## **B. *Corporate governance***

*Corporate governance* merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, dan diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para *investor* bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka

investasikan (Sriwedari, 2009). Hal ini sesuai dengan penelitian Watts (2003) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) yang menyatakan bahwa salah satu cara yang digunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku *opportunistic* manajemen adalah *corporate governance*.

Istilah *corporate governance* pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury Report* (Tjager, 2003) dalam (Sriwedari, 2009). Teori yang melandasi definisi *corporate governance* menurut *Cadbury Committee* adalah perusahaan/korporasi dapat dipandang dari dua sisi, yaitu:

#### 1. *Shareholding Theory*

*Shareholding theory* mengatakan bahwa perusahaan didirikan dan dijalankan untuk tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham sebagai akibat dari investasi yang dilakukannya. Definisi *corporate governance* berdasarkan teori pemegang saham (*shareholding theory*) menurut *Cadbury Committee*, yaitu hubungan berbagai partisipan (*investor* dan manajemen) dalam menentukan arah dan kinerja korporasi.

#### 2. *Stakeholder Theory*

Perusahaan adalah organ yang berhubungan dengan pihak lain yang berkepentingan, baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan (Freeman, 1984). Definisi *stakeholder* ini termasuk karyawan, pelanggan, kreditur, *supplier*, dan masyarakat sekitar dimana perusahaan tersebut beroperasi. Adapun definisi

*Corporate governance* dari *Cadbury Committee* yang berdasar pada teori *stakeholder* adalah sebagai berikut:

“*A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees, internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities*”.

Beberapa organisasi nasional maupun internasional telah mengembangkan konsep dari *corporate governance*, diantaranya adalah *Organization for Economics Cooperation and Development (OECD)* dan *Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*. *Organization for Economics Cooperation and Development (OECD)* merupakan organisasi yang berdiri pada tahun 1988, yang menerbitkan sejumlah dokumen untuk membantu anggota di dalamnya dalam mengevaluasi dan mengembangkan sistem hukum, *insitutional dan regulatory framework* untuk tata kelola perusahaan yang lebih baik (*Good Corporate Governance*) (OECD, 2004). *Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* merupakan organisasi yang bertugas menciptakan dan mengembangkan *corporate governance* di Indonesia. Tujuan *FCGI* adalah untuk meningkatkan kesadaran dan mensosialisasikan prinsip dan aturan mengenai *corporate governance* kepada dunia bisnis di Indonesia dengan mengacu kepada *international best practices*, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat dalam melaksanakan prinsip dan aturan yang sesuai dengan standar tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Berikut disajikan beberapa definisi *corporate governance* dari beberapa sumber, yaitu:

1. *Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2002)*

*FCGI* dalam publikasi pertama kali menggunakan definisi *Cadbury Committee*, yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Di samping itu *FCGI* juga menjelaskan bahwa tujuan dari *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Secara lebih rinci, terminologi *corporate governance* dapat dipergunakan untuk menjelaskan peranan dan perilaku dari Dewan Direksi, Dewan Komisaris, pengurus (pengelola) perusahaan, dan para pemegang saham.

2. *Organization for Economics Cooperation and Development (OECD) (2004)*

*Corporate governance* merupakan suatu struktur yang terdiri dari pemegang saham, direktur, manager, dan seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dan alat-alat yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerja.

3. Dharmawati, Khomsiyah, dan Rahayu (2004)

*Corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

*Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja.

### 3. Iqbal dan Fachriyah (2008)

*Corporate governance* dalam perspektif luas dapat didefinisikan sebagai sejauh mana perusahaan telah dijalankan dengan cara yang terbuka dan jujur untuk mempertebal kepercayaan masyarakat luas terhadap mekanisme pasar, meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya dengan baik dalam skala domestik maupun internasional, memperkuat struktur industri, dan akhirnya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat luas.

Pada April 1998, *OECD* telah mengeluarkan *corporate governance* yang dikembangkan dengan *universal*. Prinsip ini disusun untuk digunakan sebagai rekomendasi di berbagai negara yang mempunyai karakteristik sistem hukum, budaya, dan lingkungan yang berbeda. Dengan demikian prinsip *universal* tersebut dapat dijadikan pedoman oleh semua negara atau perusahaan, yang akan diselaraskan dengan sistem hukum, aturan atau nilai yang berlaku di negara masing-masing jika diperlukan (Sugiarto, 2006). Prinsip *corporate governance* yang diungkapkan oleh *OECD* (1998), yaitu:

#### 1. *The rights of shareholders* (hak pemegang saham)

Rerangka kerja *corporate governance* harus melindungi hak para pemegang saham. Prinsip kewajaran menekankan pada adanya perlakuan dan jaminan hak-hak yang sama kepada pemegang saham minoritas maupun mayoritas, termasuk



hak-hak pemegang saham asing serta *investor* lainnya. Praktik kewajaran juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham dari praktik kecurangan (*fraud*) dan praktik-praktik *insider trading* yang dilakukan oleh *agent*/manajer. Prinsip kewajaran ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang timbul dari adanya hubungan kontrak antara pemegang saham dan manajer karena di antara kedua pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda (*conflict of interest*).

2. *The equitable treatment of shareholders* (perlakuan yang adil kepada pemegang saham)

Rerangka kerja *corporate governance* harus meyakinkan adanya kesetaraan perlakuan kepada seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham asing dan minoritas. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perbaikan yang efektif atas penyimpangan dari hak mereka.

3. *The role of stakeholders in corporate governance* (peranan *stakeholders* dalam *corporate governance*)

Rerangka kerja *corporate governance* harus mengakui hak *stakeholders* seperti yang ditentukan oleh hukum dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dan *stakeholders* dalam penciptaan kesejahteraan, pekerjaan, dan kemampuan untuk mempertahankan perusahaan yang sehat secara *financial*.

4. *Disclosure and transparency* (pengungkapan dan transparansi)

Rerangka kerja *corporate governance* harus meyakinkan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat telah dilakukan atas seluruh hal yang material berkenaan dengan perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan ketaatan perusahaan.

5. *The responsibilities of the board* (tanggung jawab dewan/direksi)

Rerangka kerja *corporate governance* harus meyakinkan pedoman *strategic* perusahaan, pemantauan yang efektif pada manajemen oleh dewan, dan akuntabilitas dewan terhadap perusahaan dan pemegang saham.

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari *corporate governance* (Kaihatu, 2006) yaitu:

1. *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independency* (independen), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak

manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. *Fairness* (kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Arifin dan Rachmawati (2006) mengungkapkan bahwa, jika perusahaan benar-benar menerapkan prinsip-prinsip *corporate governance*, maka *investor* akan lebih percaya terhadap perusahaan. Sinyal-sinyal yang bertujuan menginformasikan hal-hal positif tentang perusahaan akan lebih dipercaya oleh *investor*.

Penerapan *corporate governance* mempunyai beberapa manfaat bagi perusahaan. Sutojo dan Aldridge (2005) dalam Sugiarto (2006) mengungkapkan bahwa *corporate governance* mempunyai lima tujuan utama, yaitu: melindungi hak dan kepentingan *shareholders*, melindungi hak dan kepentingan para anggota *stakeholder* dan *non shareholder*, meningkatkan nilai perusahaan dan para *shareholders*, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Dewan Direktur dan manajemen perusahaan, meningkatkan mutu hubungan Dewan Direktur dengan manajemen senior perusahaan. Penelitian Kaihatu (2006) mengungkapkan bahwa esensi dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

## 1. Mekanisme *Corporate governance*

Mekanisme *corporate governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi. Terdapat dua mekanisme untuk membantu menyamakan perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (Walsh dan Seward, 1990) dalam (Siswantaya, 2007), yaitu:

### 1. Mekanisme pengendalian internal perusahaan

Mekanisme pengendalian internal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan dengan membuat seperangkat aturan yang mengatur tentang mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, return maupun risiko-risiko yang disetujui oleh *principal* dan *agent*. Salah satu pilihan mekanisme pengendalian internal untuk menyamakan kepentingan pemegang saham dan manajer adalah kontrak insentif jangka panjang. Kontrak jangka panjang ini dilakukan dengan memberikan insentif pada manajer apabila nilai perusahaan atau kemakmuran pemegang saham meningkat, salah satunya dengan cara memberi kepemilikan saham kepada manajer. Dengan demikian, manajer akan termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan dan kemakmuran pemegang saham karena hal tersebut juga akan meningkatkan kekayaan manajer sendiri.

### 2. Mekanisme pengendalian eksternal berdasarkan pasar

Mekanisme pengendalian eksternal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan oleh pasar. Menurut teori pasar untuk pengendalian perusahaan (*market for corporate control*), pada saat diketahui bahwa manajemen berperilaku

menguntungkan diri sendiri, kinerja perusahaan akan menurun yang direfleksikan oleh nilai saham perusahaan. Pada kondisi tersebut, kelompok manajer lain akan menggantikan manajer yang sedang memegang jabatan. Dengan demikian bekerjanya *market for corporate control* dapat menghambat tindakan menguntungkan diri manajer sendiri (Jensen dan Meckling, 1976).

Penelitian ini menggunakan mekanisme *corporate governance* yang sesuai dengan penelitian Ujiyantho dan Pramuka (2007), yaitu:

- a. Kepemilikan Institusional
- b. Kepemilikan Manajerial
- c. Ukuran Dewan Komisaris
- d. Proporsi Dewan Komisaris Independen

#### **D. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain) (Tarjo, 2008). Institusi dengan investasi yang substansial pada saham perusahaan memperoleh insentif yang besar untuk secara aktif memonitor dan mempengaruhi tindakan manajemen seperti mengurangi fleksibilitas manajemen melakukan *abnormal accounting accrual* (Siswantaya, 2007). Hal ini terjadi karena *investor* institusional dianggap sebagai *investor* yang *sophisticated* karena mempunyai kemampuan dalam memproses informasi dibandingkan dengan *investor* individual (Sriwedari, 2009).

Pada umumnya pemegang saham mayoritas (konsentrasi kepemilikan institusional) menyerahkan pengelolaan investasinya pada divisi khusus dengan menunjuk profesional yang memiliki keahlian di bidang analisis dan keuangan, sehingga pemilik mayoritas dapat memantau perkembangan investasinya dengan baik, sehingga jika persentase kepemilikan cukup besar (mayoritas), maka mereka memiliki insentif untuk melakukan pengawasan secara efektif terhadap manajemen (*agent*), dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi maupun mengubah tindakan serta keputusan manajemen. Jika manajer tidak dapat memajukan perusahaan yang hal ini tidak disukai oleh pemilik, maka dapat mengakibatkan manajer tersebut diganti dan inilah salah satu bentuk pengawasan yang efektif (Tarjo, 2008) .

#### **E. Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial adalah situasi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya presentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer (Murhadi, 2009).

Jensen dan Murphy (1990) dalam Sriwedari (2009) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial merupakan program kebijakan remunerasi guna mengurangi masalah keagenan. Mereka menjelaskan bahwa kompensasi tetap berupa gaji, tunjangan, dan bonus terbukti dapat digunakan sebagai sarana untuk menyamakan kepentingan manajemen dengan pemegang saham.

Jensen dan Meckling (1976) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Penelitian mereka menemukan bahwa dengan memperbesar proporsi kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan maka manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri.

Jika manajer memiliki saham di perusahaan, mereka akan memiliki kepentingan yang sama dengan pemilik. Jika kepentingan manajer dan pemilik sejajar maka dapat mengurangi konflik keagenan. Jika konflik keagenan dapat dikurangi, maka manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan mengurangi hambatan kontraktual (Siswantaya, 2007). Hal ini mendukung penelitian Rofiqoh dan Jatiningrum (2004) dalam Haryono (2005), yang mengungkapkan bahwa jika manajer sekaligus menjadi pemilik dari saham perusahaan, maka manajer tidak akan merugikan kepentingan *owners*, yang termasuk dirinya sendiri.

#### **F. Ukuran Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Egon Zehnder International, 2000) dalam (Siswantaya, 2007). Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara

umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Ukuran Dewan Komisaris menunjukkan banyaknya personel yang menjadi Dewan Komisaris. Banyaknya jumlah Dewan Komisaris akan berpengaruh dalam pengawasan terhadap manajemen perusahaan yang nantinya akan berdampak pula pada kinerja perusahaan (Nasution dan Setiawan, 2007).

### **G. Proporsi Dewan Komisaris Independen**

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Berdasarkan Pedoman Tentang Komisaris Independen yang mengatur tentang perlunya Komisaris Independen, menyatakan bahwa jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya sebesar 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris (KNKG, 2004).

Dewan Komisaris Independen memiliki beberapa misi dalam mewujudkan kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab (Sulistyanto, 2008), yang terdiri dari:

1. Mendorong terciptanya iklim yang objektif dan keadilan untuk semua kepentingan sebagai prinsip utama pembuatan keputusan manajerial.



2. Mendorong diterapkannya prinsip dan praktek *good corporate governance* di Indonesia
3. Bertanggung jawab untuk mendorong diterapkannya prinsip *good corporate governance* melalui pemberdayaan Dewan Komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada manajer secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

### **C. Manajemen Laba**

Manajemen laba didasari oleh adanya *teory agency* yang menyatakan bahwa setiap individu cenderung melakukan tindakan untuk memaksimalkan utilitasnya. Menurut teori tersebut, setiap individu mempunyai sifat untuk mementingkan diri sendiri (Kusuma dan Sari, 2003). Manajer/*agent* terdorong untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri, sedangkan dari pihak pemegang saham/*principal* tidak dapat memonitor kinerja manajer setiap saat untuk memastikan bahwa manajer telah bekerja sesuai keinginan para pemegang saham.

Manajemen laba dapat dijelaskan sebagai bentuk khusus permainan angka dalam laporan keuangan, di mana fleksibilitas dalam *Generally Accepted Accounting Standar (GAAP)* digunakan agar laba sesuai dengan target yang telah ditetapkan (Mulford dan Eugene, 2010). Jika pada suatu kondisi dimana pihak manajemen melakukan tindakan oportunistik dalam penyusunan laporan keuangan, maka manajemen dapat menyusun laporan keuangan dengan menggunakan kebijakan

akuntansi dan *judgement* yang tidak disesuaikan dengan kondisi perusahaan, tetapi disesuaikan untuk memenuhi kepentingan pribadi manajer.

Manajemen laba tidak harus dikaitkan dengan upaya untuk memanipulasi data atau informasi akuntansi, tetapi lebih condong dikaitkan dengan pemilihan metode akuntansi (*accounting methods*) untuk mengatur keuntungan yang bisa dilakukan, karena diperkenankan menurut *accounting regulations* (Gumanti, 2000). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Scott (1997) dalam Halim, Meiden, dan Tobing (2005), yang mendefinisikan manajemen laba sebagai berikut:

*“Given that managers can choose accounting policies from a set (for example, GAAP), it is natural to expect that they will choose policies so as to maximize their own utility and/or the market value of the firm”.*

Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dari standar akuntansi yang ada dan secara alamiah dapat memaksimalkan utilitas mereka dan atau nilai pasar perusahaan. Dalam penelitian tersebut, Scott (1997) membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua. Pertama, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer (*opportunistic earnings management*), untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontak utang, dan *political costs*. Kedua, dengan memandang manajemen laba dari perspektif *efficient contracting (efficient earnings management)*, yaitu manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.

Penyalahgunaan manajemen laba terjadi jika manajer menggunakan fleksibilitas dalam penyusunan laporan keuangan untuk mengatur laba agar menarik bagi para pengguna laporan keuangan, namun tanpa diikuti dengan profitabilitas perusahaan, sehingga kinerja keuangan mengandung salah saji secara material (Mulford dan Comiskey, 2010).

Manajemen laba merupakan upaya manajemen untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan untuk menyesatkan pemegang saham yang ingin mengetahui kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang mengandalkan angka-angka akuntansi yang dilaporkannya (Healy dan Wahlen, 1998) dalam (Utomo dan Bachrudin, 2005).

Setiawati dan Na'im (2000) dalam Utomo dan Bachrudin (2005), mengungkapkan bahwa manajemen laba timbul sebagai dampak dari penggunaan akuntansi sebagai salah satu informasi dan alat komunikasi antara pihak internal perusahaan dan pihak eksternal perusahaan, sehingga menimbulkan kebijakan atau *judgment* dari pihak manajemen suatu perusahaan.

Sugiri (1998:1-18) dalam Kusuma (2006) membagi definisi manajemen laba menjadi dua, yaitu :

#### 1. Definisi Sempit

Manajemen laba dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi. Manajemen laba dalam arti sempit ini didefinisikan sebagai perilaku manajer untuk bermain dengan komponen *discretionary accruals* dalam menentukan besarnya laba.

## 2. Definisi Luas

Manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit usaha dimana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomi jangka panjang unit tersebut.

Dalam penelitian Utomo dan Bachrudin (2005), manajemen laba dapat dilakukan dengan tiga teknik sebagai berikut:

### 1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi

Pihak manajemen dalam menerapkan manajemen laba adalah dengan mempengaruhi laba melalui judgment terhadap estimasi akuntansi, diantaranya estimasi tingkat piutang tidak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tidak berwujud.

### 2. Mengubah metode akuntansi

Perubahan metode akuntansi dapat dilakukan untuk mencatat suatu transaksi. Misalnya merubah metode depresiasi dari angka tahun menjadi depresiasi garis lurus.

### 3. Menggeser periode biaya atau pendapatan

Rekayasa ini sering disebut sebagai manipulasi keputusan operasional, dengan cara mempercepat atau menunda pengeluaran operasional. Perusahaan yang mencatat persediaan dengan menggunakan metode LIFO, juga dapat merekayasa peningkatan laba melalui pengaturan saldo persediaan.

## **1. Alat Ukur Manajemen Laba**

Dasar akrual merupakan asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan yang telah ditetapkan oleh standar akuntansi keuangan. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) menyatakan bahwa untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pengguna tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Kebijakan akrual dalam mengaplikasikan standar akuntansi dapat digunakan untuk melakukan manajemen laba. Pendekatan akrual digunakan sebagai dasar untuk melakukan manajemen laba, karena pihak manajemen dapat memberikan kebijakannya dalam penyusunan laporan keuangan (Kusuma dan Sari, 2003). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) juga memberikan keleluasaan kepada manajer untuk memilih metode akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan (Halim, Meiden, dan Tobing, 2005).

Metode pengukuran manajemen laba yang paling sering dilakukan adalah dengan menggunakan *discretionary accrual* (Murhadi, 2009). *Earnings* memiliki dua komponen utama yakni kas dan *accounting adjustment* yang disebut sebagai *accrual*. Penentuan arah dan pengukuran dari *accrual* sangat dipengaruhi oleh pertimbangan pihak manajemen, sehingga *accrual* sangat mudah untuk dimanipulasi. Total *accrual* dibagi menjadi dua komponen yakni *discretionary accrual* dan *non discretionary accrual*. Penelitian ini akan menggunakan *discretionary accrual* yang merupakan modifikasi dari Jones (1991) dan Dechow, Sloan dan Sweeney (1995) dalam Murhadi (2009). Besaran *discretionary accrual* yang positif menunjukkan bahwa perusahaan mengindikasikan terdapatnya manipulasi *income* yang meningkat. Sebaliknya, besaran *discretionary accrual* yang negatif mengindikasikan terdapatnya manipulasi *income* yang menurun.

*Non discretionary accruals* adalah komponen akrual diluar kebijakan manajemen (Kusuma, 2006). Kebijakan akrual yang disebabkan tuntutan kondisi perusahaan, seperti peningkatan pendapatan perusahaan sehingga dibutuhkan penyesuaian terhadap estimasi tingkat piutang tidak tertagih disebut *non discretionary accrual*.

*Discretionary accruals* adalah komponen akrual yang berada dalam *discretion/* kebijakan manajemen atau manajer melakukan intervensi dalam proses pelaporan keuangan (Kusuma, 2006). Dalam *discretionary accruals* ini, manajemen dapat memanfaatkan *judgement* dengan menurunkan estimasi tingkat piutang tidak tertagih atau memperpanjang estimasi kurun waktu depresiasi aktiva, mengubah

metode akuntansi untuk depresiasi aktiva dari *double declining balance method* menjadi *straight line method*, dan menggeser periode biaya dan pendapatan. Manajemen laba terjadi jika manajer melakukan hal-hal tersebut karena adanya niat untuk memenuhi kepentingan pribadi, bukan karena kondisi perusahaan yang menghendaki perubahan *judgement* dan metode akuntansi serta penggeseran biaya dan pendapatan. Pengukuran *discretionary accruals* inilah yang mengindikasikan terjadinya manajemen laba (Murhadi, 2009).

Gumanti (2000) membagi transaksi akrual yang terjadi dalam penyusunan laporan keuangan menjadi dua, yaitu:

1. Transaksi yang bersifat *non discretionary accrual*, yaitu apabila transaksi telah dicatat dengan metode tertentu maka manajemen diharapkan konsisten dengan metode tersebut.
2. Transaksi yang bersifat *discretionary accrual*, yaitu transaksi yang memberikan kebebasan manajemen untuk menentukan jumlah transaksi akrual secara fleksibel.

## 2. Faktor Pendorong Manajemen Laba

Terdapat berbagai motivasi yang mendasari manajer untuk melakukan manajemen laba. Motivasi inilah yang mempengaruhi pola rekayasa manajerial yang dilakukan oleh manajer perusahaan. Dalam *positif accounting theory* terdapat tiga hipotesis yang menyebabkan terjadinya manajemen laba (Watt dan Zimmerman, 1986) dalam Gumanti (2000), yaitu:

### 1. *Bonus plan hypothesis*

Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang memberikan bonus besar berdasarkan *earnings*, lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan. Dalam suatu perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, maka seorang manajer perusahaan akan melakukan peningkatan laba saat ini yakni dengan memilih metode akuntansi yang mampu menggeser laba dari masa depan ke masa kini. Tindakan ini dilakukan dikarenakan manajer termotivasi untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi untuk masa kini. Dalam kontrak bonus dikenal dua istilah yaitu *bogey* (tingkat laba terendah untuk mendapatkan bonus) dan *cap* (tingkat laba tertinggi). Jika laba berada di bawah *bogey*, maka tidak ada bonus yang diperoleh manajer, sedangkan jika laba berada di atas *cap*, ada tidaknya bonus tergantung pada kontrak yang dibuat. Jika laba berada di bawah *bogey*, maka manajer cenderung akan memperkecil laba dengan harapan kemungkinan akan memperoleh bonus yang lebih besar pada periode berikutnya. Begitu pula jika laba berada di atas *cap*, maka manajer akan cenderung



memilih kebijakan dan prosedur akuntansi yang memperkecil laba. Jadi, hanya jika laba bersih berada di antara *bogey* dan *cap*, maka manajer akan meningkatkan laba bersih perusahaan.

## 2. *Debt covenant hypothesis*

Manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak peningkatan laba. Hal ini untuk menjaga reputasi mereka dalam pandangan pihak eksternal. Dalam suatu perusahaan yang mempunyai *rasio debt to equity* cukup tinggi, maka akan mendorong manajer perusahaan untuk cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba. Perusahaan dengan *rasio debt to equity* yang tinggi akan berakibat menimbulkan kesulitan dalam memperoleh dana tambahan dari pihak kreditor dan bahkan perusahaan dapat terancam melanggar perjanjian utang.

## 3. *Political cost hypothesis*

Adanya biaya politik dikarenakan profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat menarik perhatian media dan konsumen. Dalam suatu perusahaan besar yang memiliki biaya politik tinggi, akan mendorong manajer untuk memilih metode akuntansi yang menanggukkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode masa mendatang sehingga dapat memperkecil laba yang dilaporkan.

### 3. Bentuk Manajemen Laba

Bentuk manajemen laba atau *earnings management* menurut Scott (1997) dalam Sriwedari (2009) adalah sebagai berikut:

#### 1. *Taking a bath*

*Taking a bath* bisa dilakukan manajer pada saat perusahaan mengalami kondisi yang menurun atau sedang mengalami kerugian. Hal ini biasanya terkait dengan pergantian CEO, yang akan mengakui adanya biaya pada periode mendatang dan kerugian pada periode berjalan ketika kondisi buruk yang merugikan perusahaan tidak dapat dihindari pada periode tersebut. Oleh sebab itu, manajer melakukan manajemen laba dengan menghapus beberapa aktiva (*writte-off asset*) dan membebankan perkiraan biaya mendatang, sehingga laba yang dilaporkan di periode yang akan datang meningkat.

#### 2. *Income minimization*

Bentuk ini hampir sama dengan “*taking a bath*”, namun lebih sedikit lunak, yakni dilakukan pada kondisi yang berkaitan dengan politik dan perpajakan. Ini dapat dilakukan dengan cara mempercepat penghapusan aktiva tetap dan aktiva tak berwujud serta mengakui pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan (*Research and Development*), perawatan mesin dan peralatan (*repair and maintenance cost*), biaya pemasangan saran dan iklan (*marketing and advertising expenses*). Hal ini dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan sedang tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat perhatian secara politis sehingga dapat mengurangi biaya pajak yang akan dibayar oleh perusahaan.

### 3. *Income maximization*

Tindakan atas *income maximization* dilakukan pada saat perusahaan mengalami kerugian. Biasanya dilakukan pada kondisi *Initial Public Offering* (IPO) untuk mendapatkan perhatian *investor*, *bonus plan* untuk memenuhi kebutuhan manajer, serta *debt covenant*, yaitu perjanjian untuk mencapai tingkat laba yang ditentukan oleh kreditur agar perusahaan mendapatkan kepercayaan dari kreditur dalam permohonan kredit yang diajukan.

### 4. *Income smoothing*

Perataan laba merupakan normalisasi laba yang dilakukan secara sengaja untuk mencapai *trend* atau level tertentu. Dalam hal ini, perataan laba menunjukkan suatu usaha manajemen untuk mengurangi batas-batas yang diijinkan dalam praktik akuntansi dan prinsip manajemen yang wajar. *Income smoothing* dilakukan oleh perusahaan yang sudah mengalami laba dan cenderung menginginkan tingkat laba yang sama atau stabil pada periode mendatang. Sehingga dengan keadaan perusahaan yang stabil tersebut akan memudahkan perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi kepada *investor*.

## **D. Mekanisme *Corporate governance* dan Manajemen Laba**

Berdasarkan teori keagenan, tindakan manajemen laba yang berawal dari konflik kepentingan dapat diminimumkan melalui penerapan *corporate governance*, yaitu suatu mekanisme *monitoring* yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan tersebut (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Iqbal dan Fachriyah (2008)

mengungkapkan manajemen laba dapat dieliminasi dengan pengawasan sendiri melalui *good corporate governance*.

Mekanisme *corporate governance* mempunyai tujuan untuk menyelaraskan hubungan antara *principal* dan *agent* dengan meminimalkan konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan dan *asymmetric information* antara *agent* dan *principal*. Mekanisme kunci dari kerangka *corporate governance* meliputi struktur dewan direksi, kompensasi direksi dan kepemilikan manajerial, pemegang saham institusional, auditor, informasi akuntansi, dan auditing serta pasar untuk pengendalian perusahaan (Short dkk, 1999) dalam (Faizal, 2005). Veronica dan Bachtiar (2004) dalam Iqbal dan Fachriyah (2008) menyatakan bahwa beberapa mekanisme *corporate governance* antara lain diwujudkan dengan adanya dewan direksi, komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan institusional.

Beberapa penelitian terdahulu telah menguji pengaruh penerapan mekanisme *corporate governance* dalam mencegah terjadinya tindakan oportunistik manajer, diantaranya yaitu memperbesar kepemilikan saham oleh investor institusional karena investor institusional lebih mementingkan kinerja perusahaan jangka panjang sehingga kepemilikan saham oleh investor institusional dapat menjadi kendala bagi perilaku oportunistik manajemen yang memanfaatkan *management discretion* untuk kepentingan pribadinya yang menyebabkan kepentingan pihak lain (*shareholder*) terabaikan (Machfoedz dan Midiastuty, 2003), memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (*managerial ownership*) sehingga kepentingan pemilik atau pemegang saham akan dapat disejajarkan dengan kepentingan manajer (Iqbal

dan Fachriyah, 2008), adanya peran monitoring oleh Dewan Komisaris (*board of directors*) karena ukuran dan independensi Dewan Komisaris mempengaruhi kemampuan mereka dalam memonitor proses pelaporan keuangan sehingga dapat mencegah manajemen melakukan manipulasi pada laporan keuangan (Dechow et al dan Beasley, 1996) dalam (Siregar dan Utama, 2005).

Penelitian terdahulu telah menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba. Penelitian Ujiyantho dan Pramuka (2007) menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba. Ujiyantho dan Pramuka (2007) mengungkapkan bahwa mekanisme *corporate governance* yang diukur melalui kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran Dewan Komisaris, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah berhasil membuktikan bahwa mekanisme *corporate governance*, yang terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

Ha1: Mekanisme *corporate governance*, yang terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, proporsi Dewan Komisaris Independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba

### **E. Kepemilikan Institusional dan Manajemen Laba**

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Boediono, 2005). Selama ini *investor* institusional mempunyai waktu yang lebih banyak untuk melakukan analisis investasi dan memiliki akses informasi yang mahal dibandingkan dengan *investor* individual, sehingga *investor* institusional memiliki kemampuan mengawasi tindakan manajemen yang lebih baik dibandingkan dengan *investor* individual (Wedari, 2004) dalam (Sriwedari, 2009). Institusi sebagai pemilik saham dari kepemilikan institusional dianggap lebih mampu dalam mendeteksi manajemen laba dibandingkan dengan *investor* individual (Herawaty, 2008). Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jika presentasi kepemilikan institusional cukup besar, maka mereka memiliki insentif untuk melakukan pengawasan secara efektif terhadap manajemen (*agent*) dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi maupun mengubah tindakan serta keputusan manajemen (Tarjo, 2008).

Beberapa penelitian terdahulu telah menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba. Midiastuty dan Machfoedz (2003) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Menurut penelitian tersebut hal ini disebabkan karena *investor* institusional lebih

mementingkan kinerja perusahaan jangka panjang sehingga manajer tidak akan mempunyai insentif untuk melakukan manajemen laba sekarang, misalnya melalui *income increasing* atau *income smoothing*. Berdasarkan hal tersebut, maka kepemilikan saham oleh *investor* institusional dapat menjadi kendala bagi perilaku oportunistik manajemen yang memanfaatkan *management discretion* untuk kepentingan pribadinya, yang mungkin mengakibatkan kepentingan pihak lain (*shareholder*) terabaikan. Hal ini mendukung penelitian Bushee (1998) dalam Boediono (2005), yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens. Kepemilikan institusional dapat menekan kecenderungan manajemen untuk memanfaatkan *discretionary accrual* dalam laporan keuangan sehingga meningkatkan kualitas laba yang dilaporkan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah berhasil membuktikan bahwa kepemilikan institusional merupakan alat kontrol yang efektif dalam menurunkan tindakan manajemen laba dalam perusahaan, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

Ha2: Kepemilikan institusional berpengaruh secara negatif signifikan terhadap manajemen laba.

## **F. Kepemilikan Manajerial dan Manajemen Laba**

Berdasarkan sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Dua hal tersebut akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba (Boediono 2005).

Beberapa penelitian terdahulu telah menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. Iqbal dan Fachriyah (2008) mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini mengindikasikan bahwa di Indonesia, khususnya perusahaan *go-public* sektor industri manufaktur di BEI, kepemilikan manajerial merupakan variabel determinan yang penting untuk mengurangi praktik manajemen laba. Aplikasi yang dapat dipraktikkan adalah memperbesar kepemilikan manajerial dengan harapan bahwa pemilik saham (manajerial) akan ikut andil dalam pengawasan terjadinya manajemen laba, atau bahkan karena sebenarnya mereka yang melakukan manajemen laba maka mereka akan merasa rugi jika manajemen laba terjadi atas perusahaan yang mereka ikut memiliki sehingga manajemen laba tidak akan dilakukan. Ujiyantho dan



Pramuka (2007) telah berhasil membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh secara negatif signifikan terhadap manajemen laba. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial mampu menjadi mekanisme *corporate governance* yang dapat mengurangi ketidak selarasan kepentingan antara manajemen dengan pemilik atau pemegang saham.

Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Menurut Sriwedari (2009), motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang bukan sebagai pemegang saham. Dua hal tersebut akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Secara umum dapat dikatakan bahwa presentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba (Boediono, 2005). Demikian halnya dengan penelitian Warfield et al (1995) dalam Herawaty (2008) yang menguji kepemilikan manajerial dengan *discretionary accrual* dan kandungan informasi laba, menemukan bukti bahwa kepemilikan manajerial berhubungan negatif dengan *discretionary accrual*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besarnya insentif yang diberikan kepada manajer berupa kepemilikan saham akan mengurangi tindakan manajemen laba di perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah berhasil membuktikan bahwa dengan memperbesar jumlah kepemilikan manajerial dapat mengurangi terjadinya manajemen laba, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

Ha3: Kepemilikan manajerial berpengaruh secara negatif signifikan terhadap manajemen laba

### **G. Ukuran Dewan Komisaris dan Manajemen Laba**

Tugas utama Dewan Komisaris, yaitu mengawasi kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan merupakan hal yang penting, karena adanya faktor-faktor yang dapat mendorong manajer melakukan manajemen laba yang berdampak pada kepercayaan *investor*. Selain melakukan pengawasan dan memberi nasihat pada dewan direksi, fungsi Dewan Komisaris yang lain, sesuai dengan yang dinyatakan dalam *National Code for Good Corporate governance* (2001) dalam (Sriwedari, 2009) adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan mempertimbangkan kepentingan berbagai stakeholder perusahaan. Dewan Komisaris merupakan inti dari *Corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Egon Zehnder International, 2000) dalam (Ujiyantho dan Pramuka, 2007).

Penelitian terdahulu telah menguji pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap manajemen laba. Dewan Komisaris yang bertugas mengawasi penyusunan laporan keuangan diharapkan dapat mencegah terjadinya manajemen laba. Hal ini

sesuai dengan penelitian Yu (2006) dalam Nasution dan Setiawan (2007), yang menemukan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif secara signifikan terhadap manajemen laba yang diukur dengan menggunakan model Modified Jones untuk memperoleh nilai akrual kelolaannya. Hal ini menandakan bahwa makin sedikit Dewan Komisaris maka tindak manajemen laba makin banyak karena sedikitnya Dewan Komisaris memungkinkan bagi organisasi tersebut untuk didominasi oleh pihak manajemen dalam menjalankan perannya. Zhou dan Chen (2004) dalam Nasution dan Setiawan (2007), juga menyimpulkan bahwa ukuran Dewan Komisaris secara signifikan berpengaruh dalam menghalangi tindak manajemen laba untuk perusahaan yang melakukan manajemen laba tinggi. Hal ini mendukung penelitian Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) dalam Nasution dan Setiawan (2007), yang menyatakan bahwa semakin banyak Dewan Komisaris maka pembatasan atas tindak manajemen laba dapat dilakukan lebih efektif.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah berhasil membuktikan bahwa semakin tinggi ukuran Dewan Komisaris dalam sebuah perusahaan akan menyebabkan berkurangnya tindakan manajemen laba, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:

Ha4: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh secara negatif signifikan terhadap manajemen laba

## **H. Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Manajemen Laba**

Fama dan Jensen (1983) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007), menyatakan bahwa *non-executive director* (Komisaris Independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris Independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *Good Corporate Governance*. Hal ini sesuai dengan penelitian Dechow, Patricia, Sloan dan Sweeney (1996), Klein (2002), Peasnell, Pope dan Young (2001), Chtourou et al. (2001), Pratana dan Mas'ud (2003), dan Xie, Biao, Wallace dan Peter (2003) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007), yang memberikan kesimpulan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau *outside director* dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan jika anggota Dewan Komisaris dari luar meningkatkan tindakan pengawasan, maka hal ini juga akan berhubungan dengan makin rendahnya penggunaan *discretionary accruals*.

Penelitian terdahulu telah menguji pengaruh komposisi Dewan Komisaris terhadap manajemen laba. Nasution dan Setiawan (2007) telah berhasil membuktikan bahwa komposisi Dewan Komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba di industri perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa Komisaris Independen telah efektif dalam menjalankan tanggung jawabnya mengawasi kualitas pelaporan keuangan demi membatasi manajemen laba di perusahaan. Hal tersebut disebabkan karena dengan makin banyak anggota Komisaris Independen maka proses

pengawasan yang dilakukan dewan ini makin berkualitas dengan makin banyaknya pihak independen dalam perusahaan yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Wedari (2004) yang menyatakan bahwa proporsi Dewan Komisaris Independen dan keberadaan komite audit berpengaruh dengan arah negatif secara signifikan dengan aktivitas manajemen laba. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa proporsi Dewan Komisaris Independen dan keberadaan komite audit mampu mengurangi aktivitas manajemen laba.

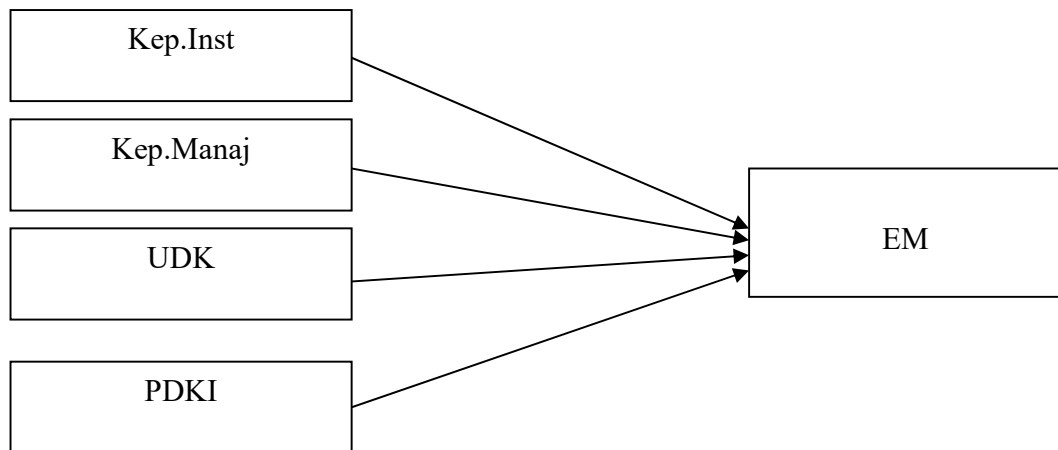
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah berhasil membuktikan bahwa semakin tinggi proporsi Dewan Komisaris Independen akan menyebabkan berkurangnya tindakan manajemen laba, maka hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah:

Ha5: Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh secara negatif signifikan terhadap manajemen laba

## I. Model Penelitian

Model regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui koefisien regresi atau besarnya variabel independen, yaitu mekanisme *corporate governance* terhadap variabel dependen, yaitu manajemen laba. Model regresi linier berganda dilakukan secara bersama-sama (simultan) dan individual terhadap manajemen laba. Model analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Model Penelitian



### Keterangan:

EM	= <i>Earnings Management</i> / Manajemen Laba
Kep. Inst	= Kepemilikan Institusional
Kep. Manaj	= Kepemilikan Manajerial
UDK	= Ukuran Dewan Komisaris
PDKI	= Proporsi Dewan Komisaris Independen

Persamaan model regresi linier berganda untuk menguji hipotesis tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba adalah sebagai berikut:

$$EM_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{Kep.Inst}_{it} + \alpha_2 \text{Kep.Manaj}_{it} + \alpha_3 \text{UDK}_{it} + \alpha_4 \text{PDKI}_{it} + e$$

Keterangan:

$EM_{it}$  = *Earnings Management* perusahaan i pada periode t

$\text{Kep.Inst}_{it}$  = Kepemilikan Institusional perusahaan i pada periode t

$\text{Kep.Manaj}_{it}$  = Kepemilikan Manajerial perusahaan i pada periode t

$\text{UDK}_{it}$  = Ukuran Dewan Komisaris perusahaan i pada periode t

$\text{PDKI}_{it}$  = Proporsi Dewan Komisaris perusahaan i pada periode t

$\alpha_0 - \alpha_4$  = Konstanta regresi

e = Error